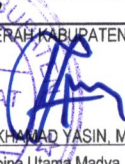
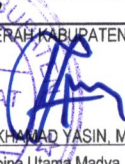
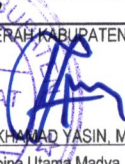
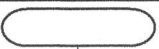
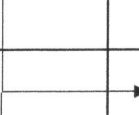
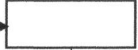
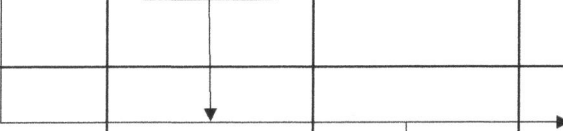
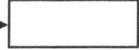
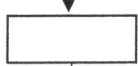
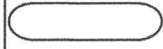
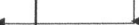


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>700/02/SOP/411.200/2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>27-3-2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>27-3-2024</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>  INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	700/02/SOP/411.200/2024	Tanggal Pembuatan	27-3-2024	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	27-3-2024	Disahkan oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010
Nomor SOP	700/02/SOP/411.200/2024										
Tanggal Pembuatan	27-3-2024										
Tanggal Revisi	-										
Tanggal Efektif	27-3-2024										
Disahkan oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010										
	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP PENGELOLAAN LAPORAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK</td> </tr> </table>	Nama SOP	SOP PENGELOLAAN LAPORAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK								
Nama SOP	SOP PENGELOLAAN LAPORAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK										
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020; 6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk	Kualifikasi pelaksana 1. Manajemen Pengawasan (wajib) 2. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD 3. Memegang teguh kode etik Pengawasan 4. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)										
Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Surat Tugas 2. SOP Pengadministrasi surat masuk 3. SOP Pelaksanaan Rapat Internal	Peralatan/perlengkapan : 1 SPT - Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat hitung.										
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan laporan monitoring MCP KPK	Pencatatan dan pendataan : 1. Kertas kerja Monitoring 2. Laporan										

NO	URAIAN AKTIVITAS	Inspektur	PIC	Inspektur Pembantu	OPD	MUTU BAKU			KET
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Inspektur menerima Pedoman Penilaian <i>Monitoring Center For Prevention (MCP)</i> KPK dari Kepala Daerah					- Surat Pelaksanaan - Pedoman Penilaian	1 hari	Disposisi Pedoman Pelaksanaan MCP KPK	
2	Inspektur menunjuk <i>Person In Charge (PIC)</i> MCP KPK					Pedoman Pelaksanaan MCP KPK	1 hari	Surat Penunjukan / Surat Perintah Tugas / Surat Keputusan PIC MCP KPK	
3	Inspektur dan PIC melaksanakan sosialisasi baik di Inspektorat dan OPD Pengampu yang harus menindak lanjuti area intervensi pada indikator <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i> KPK					- Surat Undangan - Nota Dinas	1 hari	Notulen, Daftar Hadir Sosialisasi	
4	Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan terpenuhinya area intervensi pada <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i> KPK , khususnya di Inspektorat					Surat Perintah Tugas, Dokumen kelengkapan dari pengampu area intervensi	Sampai dengan batasan pengumpulan dokumen	- Dokumen Kelengkapan - Laporan Hasil Pemantauan	
5	Dokumen dari Inspektorat dan OPD diterima <i>Person In Charge (PIC)</i> untuk menghimpun, menyimpan dan mengupload ke aplikasi Jaga.id dan melaporkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPK					Dokumen kelengkapan bukti dukung	Sampai dengan batasan pengumpulan dokumen	Hasil Verifikasi KPK	